

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Dahlan Sinaga. 2019. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Henry Campbell Black. 2009. *Black's Law Dictionary Ninth Edition* dalam Bryan A. Garner Ed. St. Paul Minnesota: Thomson Reuters.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- . 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, dan Budi Sahariyanto. 2019. *Urgensi Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Kedua Cetakan Keenam*. Yogyakarta: Liberty.

Tama S. Langkun, *Et. al.* 2014. *Studi Atas Disparitas Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Jurnal

Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima. 2021. “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 7.

Fransisco Mekel, Olga A. Pangkerego, dan Vicky F. Taroreh. 2020. “Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan KUHP”. *Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 4.

Irfan Ardiansyah. 2018. “Pengaruh Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *AKTUALITA*, Vol. 1, No. 1.

Josef M. Monteiro. 2007. “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 23, No. 2.

Retno Putri Wijayanti. 2013. “Penerapan Syarat Formil dan Materiil dalam Sebuah Surat Dakwaan yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi dalam Putusan MA Nomor 361.K/Pid.Sus/2008”, *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No.1.

Reynaldi Dwi Kusuma Akbar dan Yeni Widowaty. 2022. “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa”. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3 Issue 2.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow. 2020. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”. *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2.

Triantono, Muhammad Marizal. 2021. “Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana”, *Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459/K/Pid.Sus/2010

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Pdg a.n dr. Artati Suryani M.PH., Pgl. Tatik binti Sudarjo Panoet.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg a.n. Iswandi Ilyas, S.E., Pgl. Dede Bin Ilyas Laraga.

Artikel Internet

Ikram. “DPO Koruptor Alat D Medik Dinkes Bangkep Dieksekusi”, <https://media.alkhairaat.id/dpo-koruptor-alat-medik-dinkes-bangkep-dieksekusi/>, diakses pada 25 Maret 2023.

Indonesia Corruption Watch. “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019”. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019>, diakses pada 14 Januari 2023.

------. “Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020”. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>, diakses pada 14 Januari 2023.

------. “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021”. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>, diakses pada 14 Januari 2023.

-----". "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022". <https://antikorupsi.org/index.php/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>, diakses pada 14 Januari 2023.

Jimly Asshiddiqie. "Penegakan Hukum". http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 28 Maret 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "KBBI Online". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 10 Januari 2023.

Miko Elfisha. "Pakar UNAND: Sambo Tak Kooperatif, Hakim Berikan Vonis Maksimal". <https://sumbar.antaraneews.com/berita/554817/pakar-unand-sambo-tak-kooperatif-hakim-berikan-vonis-maksimal>, dikunjungi pada 27 Maret 2023.

Restu. "Paradigma adalah Cara Pandang Seseorang, Temukan Penjelasannya!". <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/paradigma/amp/>, diakses pada 19 Januari 2023.

Riki Perdana Raya Waruwu. "Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam PERMA". <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, diakses pada 28 Maret 2023.

Karya yang Tidak Diterbitkan

Agung Budi Maryoto. 2013. "Optimalisasi Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Nasional". Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. "Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Hukum Acara Pidana", Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. "Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2011". Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.